

**UPAYA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN
KAMPUNG WISATA DI KELURAHAN TEBING TINGGI OKURA KECAMATAN
RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU TAHUN 2014-2016**

Ananta Suhada M.

1201134678

Email :anantasuhada3232@gmail.com

Pembimbing: Rury Febrina, S.IP, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya, H.R. Soebrantas Street Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The lack of tourist attractions in Pekanbaru, forcing the City Government of Pekanbaru to think of new tourist attractions that's worthy of being developed. This issue is finally answered after the City Government through the City Mayor set the Urban Village of Tebing Tinggi Okura in the Subdistrict of Rumbai Pesisir as one of the tourist destinations of Malay history and culture. However, the efforts of Department of Culture and Tourism and other related Departments in implementation of developing this tourist attraction is still classified as weak and slow. Furthermore, there is no masterplan is also one of the problems so that the development budgets of the Tourism Village has yet to be arranged. This study intend to describe the efforts of the Department of Culture and Tourism in implementation of Tourism Village development at the Urban Village of Tebing Tinggi Okura in 2014-2016 and also to find out the factors that affects the slow performance of Department of Culture and Tourism in the development of Tourism Village in Urban Village of Tebing Tinggi Okura.

This research using descriptive qualitative research methods, with the selection of informants using purposive sampling technique, where the subjects of this research are: Section Chief of Recreation and Entertainment of Department of Culture and Tourism, Urban Village Head of Tebing Tinggi Okura, and the Group Leader of Tourism Awareness. This research was done in Urban Village of Tebing Tinggi Okura in the Subdistrict of Rumbai Pesisir, Pekanbaru. Data collection techniques used is in-Depth Interview, observation, and documentation.

The results of this research showed that the efforts of the Department of Culture and Tourism in the development of tourism in the Urban Village of Tebing Tinggi Okura in 2014-2016 is the Government formed the Group of Tourism Awareness that intend to develop tourist destinations in Tourism Village of Okura that fits to each job. Furthermore, the Government is running a test of the dock and the water bus to make it easier for the tourist to come to Tourism Village of Okura. The internal factors that affect the performance of Department of Culture and Tourism in developing Tourism Village of Okura are lack of budgets and there are no masterplan, also Tourism Village of Okura are not priority in Renja nor Restra.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan yang sangat baik bagi perekonomian dan sebagai penghasil devisa negara kedua setelah minyak bumi dan gas alam. Sejak tahun 1978 pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011, yaitu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025, Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan tiga segi yakni segi ekonomis (devisa, pajak-pajak), segi kerjasama antar negara (persahabatan antarbangsa), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan mancanegara), sehingga pariwisata mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,

pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pariwisata adalah salah satu industri gaya baru, pariwisata diarahkan sebagai sektor yang dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemberdayaan masyarakat sekitar, untuk memperluas kesempatan kerja, dan memasarkan produk-produk budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan wisata harus terencana, bertahap secara menyeluruh untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pariwisata timbul dari interaksi wisatawan, bisnis pemerintah tuan rumah, serta masyarakat tuan rumah. Keterlibatan pemerintah ini termasuk pada pembangunan, perawatan, dan pengembangan objek wisata. Kesemuanya ini membutuhkan biaya yang dianggarkan oleh pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun berdasarkan usulan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang akhirnya disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta disahkan dengan Peraturan Daerah.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Pekanbaru, merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan beragam aturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang kemudian diaktualisasikan oleh pemerintahan daerah melalui lembaran Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 pasal 23 yang berbunyi,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Secara struktural lembaga ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Minimnya tempat wisata di Pekanbaru, memaksa Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memikirkan tempat wisata baru yang layak dikembangkan. Minimnya tempat wisata di Pekanbaru ini akhirnya terjawab setelah Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Walikota menetapkan Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang terletak di Kecamatan Rumbai Pesisir sebagai salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya melayu oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang telah diketahui pada tahun 2010, Kelurahan Tebing Tinggi Okura telah mendapatkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru nomor 84 tahun 2010 bahwa Kelurahan Tebing Tinggi Okura sudah ditetapkan sebagai Kampung wisata (Ketua Kelompok Sadar Wisata).

Menurut pengamatan sementara yang terjadi di Kampung wisata yang terletak di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, upaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan instansi terkait dalam pelaksanaan pembangunan objek wisata masih tergolong lamban. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kurang tanggap dalam melihat catatan angka kunjungan yang ada di kawasan Kampung wisata Okura dari Tahun 2014 sampai 2016 mengalami kenaikan yang cukup meningkat. Hal itu dikarenakan belum adanya *masterplan*, sehingga anggaran pembangunan untuk Kampung wisata tersebut belum dapat disusun.

Karena tidak ada anggaran pengembangan, pihak dari Kelompok Darurat Wisata (POKDARWIS) di Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang sebagian bermata pencarian sebagai petani dan peternak hewan tidak dapat melakukan upaya yang berarti demi menjaga dan mengembangkan destinasi wisata tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Upaya

Definisi upaya Menurut Poerwadarminta (1991:574), “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787), “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”. Selanjutnya menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008: 1787), “mengupayakan adalah mengusahakan, mengikhtiarkan, melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar) dan sebagainya”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah di Indonesia merupakan penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah di Indonesia meliputi Gubernur, Bupati, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Pasal 18 ayat 5 UUD 1945 disebutkan bahwa, Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten

dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Pembangunan Kepariwisata

Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki (PP No. 50 Tahun 2011). Menurut Soekanto (2013:360-361) pembangunan merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Proses pembangunan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual, maupun

material. Pembangunan untuk mencapai tertentu itu, dapat dilakukan melalui cara-cara tertentu. Pada dasarnya dikenal cara-cara:

- a. Struktural, yang mencakup perencanaan, pembentukan, dan evaluasi terhadap lembaga-lembaga sosial, prosedurnya serta pembangunan secara material.
- b. Spiritual, yang mencakup watak dan pendidikan dalam penggunaan cara-cara berfikir secara ilmiah.
- c. Struktural dan spiritual.

Istilah pariwisata berasal dari Bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tapi semata-mata untuk menikmati perjalanan guna bertamasya atau rekreasi dan untuk menutupi kebutuhan yang beraneka ragam. Pengertian ini dapat dipahami bahwa unsur pokok dari pariwisata adalah adanya unsur perjalanan, unsur tempat, aktivitas perjalanan, adanya unsur waktu, unsur tempat dan tujuan serta pemenuhan kebutuhan. (Yoeti, 1996:112).

Menurut Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang diselenggarakan dalam jangka waktu yang pendek dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan maksud untuk bertamasya atau rekreasi dengan tujuan akhir untuk mendapatkan kepuasan secara pribadi. Selain itu, dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan perjalanan dalam berwisata akan memerlukan berbagai barang dan jasa sejak mereka pergi dari tempat asalnya sampai di tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat asalnya.

Desa Wisata

Definisi dari Desa Wisata dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) dalam Hadiwijoyo (2012:68) definisi dari Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan dengan keseluruhan suasana yang asli dan khas baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, kegiatan perekonomian yang menarik, serta memiliki potensi yang dapat dikembangkan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan dan minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.

Menurut Hadiwijoyo (2012:81) Desa Wisata bertujuan menggali dan mempertahankan nilai-nilai adat serta budaya yang telah berlangsung selama puluhan tahun di desa tersebut. Lestarinya nilai-nilai budaya merupakan daya tarik yang utama bagi wisatawan. Dengan kata lain suatu desa tidak akan memiliki daya tarik apabila tidak memiliki budaya, adat istiadat yang unik dan eksotik. Pengembangan konsep Desa Wisata dinilai efektif dalam rangka mengenalkan serta memberi peluang kepada

masyarakat pedesaan untuk memahami esensi dunia pariwisata serta hasil dari kepariwisataan tersebut. Pengembangan konsep Desa Wisata ini berpotensi bagi daerah yang memiliki karakteristik dan keunikan terutama di keseharian masyarakat desanya. Dengan adanya potensi yang dimiliki menyebabkan ketertarikan bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu Desa Wisata (Hadiwijoyo, 2012: 81).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.KM.18/HM.001/MKP/2011 Tentang Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Pariwisata, menyebutkan bahwa Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara aktraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Jadi Desa Wisata dapat didefinisikan sebagai sebuah desa yang memiliki potensi wisata dan memiliki fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi. Desa Wisata biasanya memiliki kecenderungan kawasan pedesaan yang memiliki kekhasan dan daya tarik sebagai tujuan wisata.

Akomodasi yang dimaksud adalah sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. Sedangkan atraksi merupakan keseluruhan kehidupan keseharian penduduk setempat beserta tempat fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif dalam kegiatan seperti kursus tari, bahasa, pelatihan kerajinan dan hal-hal lain yang bersifat spesifik.

METODE PENELITIAN

Penelitian Kualitatif

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Data yang dihasilkan dari metode penelitian kualitatif berupa data deskriptif. Data deskriptif merupakan data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 2012: 11).

Penelitian ini diadakan pada bulan Februari sampai dengan Juli 2018, di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah orang-orang pilihan penulis yang dianggap terbaik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penulis. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan informan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini ini teknik *purposive sampling* yakni pengumpulan informan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan ciri-ciri spesifik yang menjadi kriteria yang relevan dengan penilaian (Nasution, 2012:98). Penulis memilih informan berdasarkan teknik *purposive sampling* dimana satu orang dari DISBUDPAR Kota Pekanbaru, satu orang dari Kelurahan Tebing Tinggi Okura dan satu orang dari Kelompok Sadar Wisata. Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Adapun kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kasi Rekreasi dan Hiburan DISBUDPAR Kota Pekanbaru.

2. Kepala Kelurahan Tebing Tinggi Okura.
3. Ketua Kelompok Sadar Wisata.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu model interaktif yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman yang dikutip dan diterjemahkan oleh Sugiyono (2010:426), menjelaskan bahwa dalam teknik analisis data memiliki empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pembangunan Kampung wisata di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Tahun 2014-2016

Kampung wisata Okura yang berada di Kelurahan Tebing Tinggi merupakan salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya melayu di Kota Pekanbaru. Sebagai salah satu desa tertua yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki banyak potensi wisata, Pemerintah Kota Pekanbaru meresmikan Desa Okura sebagai Kampung wisata pada tahun 2010 melalui Surat Keputusan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru nomor 84 tahun 2010.

Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 pasal 23 yang berbunyi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Meski potensi pariwisata dari sektor alam yang tidak terlalu memadai, namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Pekanbaru terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk

memaksimalkan potensi wisata alam yang ada, termasuk Desa Wisata Okura.

Dalam hal ini, beberapa upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru yang telah dilaksanakan sejak diresmikannya Desa Okura sebagai Desa Wisata pada tahun 2010 yaitu:

1. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata
2. Uji Coba Dermaga dan Armada Bus Air

Kemampuan untuk Mendorong dan Meningkatkan Perkembangan Kehidupan Ekonomi dan Sosial Budaya.

Upaya pemerintah dalam membangun Kampung wisata Okura harus memperhatikan kemampuan dan tingkat penerimaan masyarakat sekitar desa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui karakter dan kemampuan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat sekitar secara tepat. Upaya pemerintah dalam membangun dan mengelola Kampung wisata Okura diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar.

Sejak dibangunnya akses jalan ke Kampung Wisata Okura pada tahun 2014 dengan dibangunnya akses darat atau jalan aspal, pembangunan di Kampung Wisata Okura dapat berlanjut. Hal ini ditunjukkan dengan dibukanya Kampung Wisata Okura untuk umum, dan hal ini juga yang mendorong perkembangan kehidupan perkonomian dimasyarakat. Sebelum adanya akses jalan, perekonomian mereka mengandalkan air sungai dan ikan air tawar untuk membuat ikan salai sebagai sumber penghasilan.

Ekonomi masyarakat sekitar yang tadinya didominasi oleh peternakan, perkebunan serta di bidang perikanan telah merambah ke bidang wirausaha. Seiring perkembangan pembangunan sarana dan prasarana di Kampung wisata Okura tersebut, ekonomi masyarakat juga berkembang ke arah yang lebih baik

Tentunya perkembangan industri pariwisata yang dalam hal ini adalah desa wisata mempunyai dampak bagi ekonomi suatu wilayah, antara lain pemerataan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan pendapatan daerah. Berdasarkan wawancara diatas, masyarakat menyambut dengan baik ditetapkannya Desa Okura sebagai Kampung wisata sebab hal ini dapat menjadi mata pencaharian baru bagi masyarakat sekitar Kampung wisata Okura. Masyarakat dapat mengembangkan usahanya dari yang awalnya hanya di sektor perkebunan dan peternakan menjadi sektor perdagangan.

Perkembangan ekonomi yang terjadi dimasyarakat sejak dibukanya Kampung Wisata Okura untuk umum pada tahun 2014 ternyata belum maksimal. Hal ini disebabkan belum maksimalnya pembangunan yang terjadi di Kampung Wisata tersebut sehingga belum menunjukkan hasil yang signifikan seperti yang diharapkan.

Nilai-Nilai Agama, Adat Istiadat, Serta Pandangan dan Nilai-Nilai yang Hidup dalam Masyarakat.

Dalam proses pembentukan dan pembangunan suatu objek wisata perlu diperhatikan pula nilai-nilai agama, adat-istiadat serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut perlu dijaga dan dilestarikan agar nantinya dapat dijadikan suatu ciri khas dari objek

wisata tersebut. Begitu pula dengan Kampung Wisata Okura. Kampung Wisata Okura sangat menjaga nilai-nilai agama, adat-istiadat serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat sekitar Kampung Wisata Okura yang berhubungan dengan nilai – nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai – nilai yang hidup di masyarakat yaitu:

1. Pengajian dari masjid ke masjid
2. Pelestarian mushala tempat berkumpul
3. Pendirian cagar budaya

Kelestarian Budaya dan Mutu Lingkungan Hidup

Terdapat 3 POKDARWIS yang telah diberikan program kerja masing – masing untuk dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan menarik wisatawan domestik maupun internasional. Ketiga POKDARWIS tersebut antara lain:

1. Badeo
Badeo merupakan POKDARWIS yang mengembangkan pariwisata di Kampung wisata Okura di bidang adat istiadat masyarakat sekitar. Badeo merupakan POKDARWIS tertua atau yang pertama dibentuk dari ketiga POKDARWIS yang ada yaitu pada tanggal 7 Mei 2014. Mereka melestarikan tari-tarian adat dari masyarakat sekitar serta permainan – permainan daerah jaman dulu.
2. Rasau Sati
Rasau Sati adalah POKDARWIS kedua setelah dibentuknya Badeo, Rasau

Sati dibentuk pada tanggal 14 Desember 2014. Rasau Sati merupakan salah satu POKDARWIS yang mengembangkan pariwisata di Desa Okura yaitu tentang kebiasaan – kebiasaan masyarakat dulu serta wisata air. Contohnya seperti memancing, menjaring ikan dan lain sebagainya.

3. WDO
Wisata Dakwah Okura merupakan salah satu bentuk wisata religi dan olahraga *Sunnah*. WDO dibentuk pada tanggal 21 maret 2017 dan merupakan POKDARWIS yang termuda diantara 2 lainnya. Di dalam WDO didirikan sebuah pesantren serta peternakan kuda yang mana digunakan untuk olahraga berkuda. WDO sendiri memiliki tugas mengembangkan pariwisata di Desa Okura sesuai dengan nilai-nilai agama, yaitu seperti adanya pesantren serta adanya olahraga *Sunnah* yaitu berkuda dan memanah.

Kelanjutan dan Usaha Pariwisata Itu Sendiri

Berbagai usaha masih terus dilakukan demi kelanjutan usaha pariwisata itu sendiri, seperti yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beberapa waktu lalu yaitu pembangunan dermaga dan armada bus air. Pemerintah melakukan uji coba pembuatan dermaga dan armada bus air untuk mempermudah akses menuju Kampung wisata Okura bagi wisatawan yang akan kesana melalui Pelabuhan

Sungai Duku. Dalam proses pembangunannya, dana untuk pembuatan dermaga dan armada bus air ini berasal dari APBN. Namun dikarenakan masih minimnya pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya di Kampung wisata Okura, wisatawan jarang tertarik untuk datang berkunjung, akibatnya dermaga uji coba tersebut menjadi rusak dan tidak terpakai lagi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pembangunan Kampung wisata di Kelurahan Tebing Tinggi Okura

Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang.

1. Kurangnya Anggaran
Pembangunan Kampung wisata Okura juga memiliki hambatan dalam hal anggaran. Hal ini dikarenakan Kampung wisata Okura masih berada di bawah naungan Kelurahan Tebing Tinggi Okura sehingga menjadikan Kampung wisata Okura berbeda dengan desa-desa lainnya yang memang mendapatkan dana dari Program Dana Desa sejumlah 1 milyar per tahunnya
2. Tidak Adanya *Masterplan*
Menurut pengamatan sementara yang terjadi di Desa Wisata yang terletak di Kelurahan Tebing Tinggi Okura, upaya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dan instansi terkait dalam pelaksanaan

pembangunan objek wisata masih tergolong lemah dan lamban. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kurang tanggap dalam melihat catatan angka kunjungan yang ada di kawasan Kampung Wisata Okura dari Tahun 2014 sampai 2016 mengalami kenaikan yang cukup meningkat. Hal itu dikarenakan belum adanya *masterplan*, sehingga anggaran pembangunan untuk Desa Wisata tersebut belum dapat disusun. Karena tidak ada anggaran pengembangan, pihak dari Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di Kelurahan Tebing Tinggi Okura yang sebagian bermata pencarian sebagai petani dan peternak hewan tidak dapat melakukan upaya yang berarti demi menjaga dan mengembangkan destinasi wisata tersebut.

3. Tidak Diprioritaskan dalam Restra maupun Renja tidak ada satupun yang menyinggung atau memasukan Desa Wisata Okura sebagai targetnya, semua program kerja tersebut berfokus pada kegiatan pengenalan destinasi wisata di kota pekanbaru yang di anggap lebih mumpuni dibandingkan dengan Desa Wisata Okura seperti contohnya Kampung Bandar. Oleh sebab itu, pengembangan di Desa Wisata Okura sendiri menjadi terhambat.

Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggal.

1. Sebagian Besar Wilayah Kampung wisata Okura merupakan Tanah Milik Masyarakat Setempat. Hal ini merupakan suatu hambatan dalam kemajuan pembangunan Kampung wisata Okura karena beberapa sarana dan prasarana yang dibangun di atas tanah masyarakat tersebut kurang diperhatikan. Hal ini dikarenakan tanah masyarakat tempat berdirinya sarana dan prasarana tersebut sewaktu-waktu bisa dialihfungsikan oleh pemiliknya tanpa sepengetahuan Pemerintah.
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Memajukan Desa. Dalam membangun Desa Okura sebagai Kampung wisata, masyarakat sekitar yang tinggal di Kampung wisata Okura dinilai kurang berpartisipasi dalam menjaga sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh Pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pembangunan Kampung wisata di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Tahun 2014-2016, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan Kampung wisata di Kelurahan Tebing Tinggi Okura tahun 2014-2016 yaitu:
 - a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membentuk Kelompok Sadar Wisata dengan tujuan untuk mengembangkan destinasi wisata di Kampung wisata Okura ini yang sesuai dengan tugasnya masing – masing. POKDARWIS tersebut terbagi atas 3 kelompok yaitu Kelompok Wisata Dakwah Okura yang tugasnya mengelola Wisata Sunnah serta peternakan kuda. Kemudian Kelompok Sadar Wisata Rasau Sati yang bertugas melestarikan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Melayu jaman dahulu. Selanjutnya yaitu Kelompok Sadar Wisata Badeo yang memiliki tugas untuk melestarikan adat istiadat Melayu yang ada di Kampung wisata Okura.
 - b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan uji coba pembuatan dermaga dan armada bus air untuk mempermudah akses menuju Kampung wisata Okura bagi wisatawan yang dananya diperoleh dari dana APBN.
2. Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan Kampung wisata Okura masih belum memperlihatkan hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkesan terburu-buru dalam mengesahkan Desa Okura menjadi sebuah Kampung wisata. Hal ini terlihat dari belum jelasnya anggaran dan pendanaan yang akan digunakan untuk pembangunan Kampung wisata Okura ini kedepannya. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam membangun Kampung wisata Okura, yaitu:
 - a. Masyarakat sekitar Kampung wisata Okura terkesan *cuek* dalam berpartisipasi dalam menjaga sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 - b. Kampung wisata Okura sebagian besar dibangun diatas tanah milik masyarakat sekitar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengkhawatirkan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun tersebut akan dialihfungsikan oleh pemilik tanah.
 - c. Sumber dana Kampung wisata Okura sendiri

berasal dari APBD Kota Pekanbaru, dimana dana tersebut tidak selalu dianggarkan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan Kampung wisata Okura masih berada di bawah naungan Kelurahan Tebing Tinggi Okura sehingga menjadikan Kampung wisata Okura berbeda dengan desa-desa lainnya yang memang mendapatkan dana dari Program Dana Desa sejumlah 1 Milyar Rupiah per tahunnya. Ditambah lagi dengan belum adanya *masterplan* sehingga semua kegiatan yang dilakukan untuk Desa Wisata Okura selama ini tidak dimasukkan kedalam Restra maupun Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, saran-saran yang dapat dijadikan perbaikan tentang Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pembangunan Kampung wisata di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Tahun 2014-2016, sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan dibantu Kelompok Sadar Wisata diharapkan kedepannya dapat merangkul masyarakat sekitar dalam menjaga fasilitas-fasilitas

yang ada di Desa Okura. Misalnya, dengan melakukan sosialisasi atau pertemuan dengan masyarakat sekitar yang tanahnya masuk ke dalam wilayah Kampung wisata Okura.

2. Sumber dana pembangunan Kampung wisata Okura yang awalnya berasal dari APBD yang tidak dianggarkan setiap tahun diharapkan dapat dianggarkan setiap tahunnya sehingga pembangunan Kampung wisata tersebut menjadi lancar dan dapat menarik lebih banyak wisatawan dan dengan begitu bisa segera dibentuk *masterplan* guna mempercepat pembangunan di Kampung Wisata Okura dan bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-----, 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika

Faisal, Sanafiah. 1999. *Format-Format Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

-----, 2010. *Format-Format Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat; Sebuah Pendekatan Konsep*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marpaung, Happy dan Bahar Herman. 2002. *Pengantar Pariwisata*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Marpaung, Happy. 2002. *Pengetahuan Pariwisata*. Alfabeta, Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muljadi, A.J. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta. Penerbit: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2014. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Neuman, W. L. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (5th ed.)*. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, Budi. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetrisno. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Penerbit Karnisius. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, Hadi. 2004. *Metodologi Research 2*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widjaja, HAW. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pemasaran Pariwisata (Edisi Revisi)*. Penerbit Angkasa, Bandung.
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata (Edisi Revisi)*. Penerbit Angkasa, Bandung.
- Jurnal, Skripsi, dan Tesis.**
- Kanuna, Resky Sirupang. *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Potensi Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara*. Universitas Hasanuddin. 2014.
- Maha Rani, Deddy Prasetya. 2014. *Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang)* *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, 412-421. Surabaya: FISIP UNAIR.
- Nurfadilah, Khairunisa Afsari. 2017. *Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Pangandaran Studi Kasus di Kabupaten Pangandaran*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Prakoso, Aditha Agung. 2008. *Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Rute Wisata Kasus: Desa Wisata Srowolan, Sleman, DIY*. Yogyakarta: UGM.

Setyaratih, Fickyana. 2013. *Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Museum*. S1 Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.

Wiendu, N. 1993. *Concept, Perspective and Challenges, Makalah Bagian dari Laporan Konferensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 2-3.

Yudya M, Tonny. 2014. *Strategi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (Studi Kasus Pada Pelaku Pariwisata di Wisata Alam Selo Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.

Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata No. KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru No. 84 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Kampung Wisata Kota Pekanbaru.

Website.

<https://issuu.com/riaupos/docs/2017-03-23/35> (Diakses pada 2017-11-15)

<http://wisata-tanahair.com/2016/09/wisata-alam-wisata-di-desa-okura-yang.html> (Diakses pada 2017-09-29)